Wakil Bupati: Tenaga Pendamping Berperan Besar Dalam Validasi Data PKH

Selasa, 24 Mei 2022

Wakil Bupati Mujib Imron menekankan pentingnya validitas data dalam program PKH. Dia meminta tenaga pendamping untuk memastikan data KPM sesuai dengan kondisi terbaru di lapangan. Validasi data dilakukan dengan membandingkan data yang ada di bank dengan laporan dari pendamping, termasuk data KPM yang sudah dan belum melakukan transaksi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa masyarakat yang benar-benar membutuhkan menerima jaminan sosial dari Pemerintah.

Dalam Rekonsiliasi Tahap I SDM PKH, Wakil Bupati menegaskan peran penting tenaga pendamping dalam membantu Pemerintah melindungi dan memberdayakan masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Jaminan Sosial yang mewajibkan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Daerah untuk mendekatkan diri dengan masyarakat dan membangun masyarakat yang hebat, kuat, dan sehat.

Wakil Bupati menekankan esensi dari rekonsiliasi penerima bantuan sosial, yaitu untuk melakukan sinkronisasi data dan membahas upaya pemberdayaan KPM menjadi masyarakat yang berdaya. Dia juga mewanti-wanti pendamping untuk memastikan bahwa tidak ada masyarakat lemah dan tidak mampu yang tidak mendapatkan jaminan sosial.

Wakil Bupati menyatakan bahwa Pemerintah bertanggung jawab untuk membangun rakyat yang cerdas dan sehat. Hal ini dilakukan dengan menjamin ketersediaan sarana pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat. Rekonsiliasi tahap pertama dan kedua bertujuan untuk memastikan bahwa tenaga pendamping bangga menjadi bagian dari SDM PKH.

Selain menyalurkan bantuan sosial PKH, pendamping juga berkewajiban untuk melakukan pemutakhiran data, termasuk memastikan perubahan data anggota KPM PKH dan bahwa Bansos PKH diterima KPM tepat jumlah dan tepat sasaran.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.